

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU TANI DALAM
PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI
(Studi di Dinas Pertanian Kota Apel)**

**SKRIPSI
ADMINISTRASI PUBLIK**



**Disusun Oleh :
VITA PINASARI
2017210162**

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2021**

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU TANI DALAM PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI

Vita Pinasari, Sugeng Rusmiwari¹, Firman Firdausi²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas FISIP Universitas Tribhuwana Tungadewi
Malang.

E-mail vitapina488@gmail.com

ABSTRAK

Program yang digarap penguasa untuk mengakhiri persoalan penggelapan dan kekurangan pupuk bersubsidi adalah Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi lewat Kartu Tani yang dijawab menurut Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. Desa Oro-Oro Ombo Kota apel (Panderman 1) menggunakan tes Kartu Tani menurut jawaban Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota apel Provinsi jatim Tahun 2020. Maksud dari kupasan ini adalah untuk membedah implementasi kebijakan program kartu tani dalam pendistribusian pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani di Desa Oro-Oro Ombo (Panderman 1) Kota Batu. pusat dari kupasan ini meliputi variabel yang merajai implementasi kebijakan berdasarkan, wacana, faktor produksi Pelaksana,tempat dan tatanan organisasi. Topik kupasan ini berlangsung dari pemangku Kartu Tani dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota apel , PPL Desa, Ketua Kelompok Tani, juragan kios resmi pupuk bersubsidi, penerima Kartu Tani. cara penimbunan petunjuk yang dipakai berbentuk tanya jawab, pemeriksaan, dan penyimpanan. buatan dari ulasan ini membuktikan Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani dalam Pendistribusian Pupuk Bersubsidi usai mencukup baik, tetapi butuh arahan eksklusif tentang penanam yang belum menangkap menguntukan kartu tani ketika membeli pupuk bersubsidi.

Kata Kunci: Implementasi, Kartu Tani, Pupuk Bersubsidi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tarikh masa, membuat kemajuan pemahaman dibantu lewat sarana pada beraneka disiplin. menuntut penguasa jangan membawahkan penduduk saat pengelolaan jiwa semua. Dengan demikian peran penguasa tidak hilang begitu saja, tapi harus dapat menambah peran-peran tertentu, salah satunya membangun keunggulan kompetitif di negara tersebut. (Nugroho 2006:22). Melihat perkembangan fenomena yang terjadi, disebabkan karena perkembangan wawasan serta teknologi yang membuat kebutuhan semakin meningkat.

Demikian pula fenomena wawasan yang terus mengalami perkembangan, mengiringi keperluan dalam universalan ini. Kebijakan pada umumnya untuk memecahkan atau menjawab masalah dan mampu membawa dampak positif bagi masyarakat. Kebijakan publik adalah seluruh proses aktivitas yang menjadi acuan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat sasaran. Dengan adanya kebijakan bisa menjawab semua persoalan pada kehidupan bermasyarakat (Langkai, 2020:31). Makmur (2016:36) implementasi adalah pemikiran, tindakan yang direncanakan secara baik dan rasional yang bertujuan untuk ketertiban dan mewujudkan cita-cita bersama.

Sementara wujud desain penguasa tersedia nusantara halnya yaitu ketetapan, Kepres, permen, Perda, Pardes atau PerRT. Strategi umum di nusantara sangatlah banyak tersangkut total penguasa, total penduduk yang mengikuti strategi dan total masalah yang menarik mengasyikan umum dan akan digarap oleh penguasa tercatat.

Kota batu merupakan kota dengan lahan pertanian yang luas dan perkembangan pertanian yang bagus. Dalam memenuhi kebutuhan petani, petani membutuhkan pupuk untuk penyuburan tanaman namun petani kesulitan dalam mendapatkan pupuk. Yang menjadi masalah adalah sistem

yang ada belum berjalan seperti yang diharapkan dan terjadi kelangkaan pupuk tidak tepat tempat, harga di atas ketentuan (Chakim. 2019. Jurnal Pangan. Vol 28 No 3).

Pada media Online Jatim Now.com, edisi 16 September 2020 menerangkan bahwa dalam pengimplementasian penggunaan kartu tani di kawasan jatim individual Kota apel, berjumpa kerusakan yang dialami yaitu Gabungan Kelompok Tani (Gapotan) atau Kelompok Tani (Poktan) Kota apel mengaku masih kesulitan untuk menggunakan kartu tani yang mereka dapat dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Kota apel.

Permasalahan kurangnya sosialisasi Pemerintah Daerah terhadap masyarakat Kota apel, membuat kepedulian primer pengkaji. Asal mula itu pengkaji terdorong buat memenuhi kajian Tentang **“Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani dalam Pendistribusian Pupuk Bersubsidi (Studi di Dinas Pertanian Kota Batu)”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Dengan cara apa tindakan strategi rencana Kartu Tani dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kota Batu?
2. Dengan cara apa variabel pengikut dan penghalang petani dalam tindakan rencana Kartu Tani di Kota apel?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Akan mengenal tindakan program Kartu Tani dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kota apel
2. Dengan cara apa variabel pengikut dan penghalang cara desain Program Kartu Tani Kota Batu

1.4. Manfaat Penelitian

- a. keuntungan buat menaikkan pandangan kepada pengarang dan orang lain
- b. buat rakyat, bahan berita buat penduduk untuk mengenal strategi Dinas Pertanian kepada Program Kartu Tani dalam Pendistribusian Pupuk Bersubsidi
- c. Buat penguasa, kajian ini menguntungkan penguasa mengetes ulang strategi dan menetapkan di rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2018. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Chakim, Muhammad Lutfil. 2019. *Pengaruh Implementasi Kartu Tani Terhadap Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Kendal Jawa Tengah*. Jurnal Pangan. Vol 28
- Dunn, William N. 1998. *Pengantara Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: CV. Widya Karya
- Ketut. 2016. *Implementasi Penggunaan Kartu Petani: Sebagai Media Pengendali Distribusi Pupuk Bersubsidi*. Politeknik Negeri Malang. Vol 8
- Langkai, Jeane Elisabeth. 2020. *Kebijakan Publik*. Malang: Seribu Bintang
- Makmur dan Rohana Thahier. 2016. *Konseptual dan kontekstual adminitrasi dan organisasi terhadap kebijakan publik*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Moleong. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Roni, Yohanes. 2020. *Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Pedagangan Dalam Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi*. Jurnal Adminitrasi Negara. Vol 9
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligencia Media.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Vidyanita, vivi. 2016. *Kinerja Birokrasi dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Jombang*. Jurnal Adminitrasi Publik. Vol 5
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogjakarta: Media Press.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun Anggaran 2019

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/O4/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di lingkungan Lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah

Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Nomor:492/Kpts/SR.320/B.5.2/08/2020 Tanggal 19 Agustus 2020 perihal Implementasi Kartu Tani

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Ansuransi Pertanian

Peraturan Daerah Kota Batu nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Walikota Batu Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, khususnya pada lampiran II telah diatur mengenai pedoman penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

<https://tirto.id/bps-jumlah-penduduk-bekerja-triwulan-i-2018-sebanyak-12707- juta-cJ5D> (akses pada 10 Mei 2021)

<https://jatimow.com/para-petani-di-kota-batu-masih-kesulitan-memanfaatkan-kartu-tani> (akses pada 10 Mei 2021)